

## SUPERVISI PEMBELAJARAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU IPS DI SMP NEGERI 2 KOTA TERNATE

**Rustam Hasyim, MukhtarYusup**  
*Dosen PKN, FKIP Unkhair Ternate*

### Abstract

*This research to describes the supervision by Supervisor. In education needs supervision because it is the part of point effort to increase the learning achievement and quality of school. The effort to improving competence of teacher and head master its can done by given helping professional like as implementation, consultation and guidance, and also the activities that related with the improvement of competence quality. Every supervisor demand to have the base of certain capability than other in educational. The base capability called competence. Competence is knowledge, skill/ know-how, ability or capacity to get to someone that becomes part of its situation until supervisor has capability to do to cognitive agent, affective and certain psychomotor in optimal. The conceptual of this research as follow: (1).Supervision management, (2). Supervision's effectiveness by supervisor, (3).Supervision management to increase the education quality of teacher. This research used qualitative method and descriptive approach. Technique to determining the data is purposive sampling, its focus to the key of informant is actors in implementation and as an actor in carrying out of the location. Getting the data, primer data although secondary data its based on the observation, documentation and focus interview (in-depth-interview) that used the guidelines of interview not structure. The next getting data is verification and analysis with the theorist interpretation. The findings of this research are some points related with the obstacles that appear in supervision management by supervisor in Department of National education area of Ternate city. (1). less care from government to increase the professionalism of supervisor, (2). less facility of transportation for supervisor, (3). Not yet the different from other's room for supervisor, (4). less guidance supervision book of supervisor, (5). Less comprehension about supervision concept of supervisor, (6). The teacher's supervision don't prepare the learning set of equipment when get the supervision, (7). Almost the teacher came late in the first class when the supervisor to do to supervision, (8). Used time is not affective by teacher when supervisor get the supervision, (9). Management class is not effective by teacher when supervisor get supervision.*

**Key Word:** *Supervision Management, teachers' competence*

### PENDAHULUAN

Di era otonomi daerah serta kemajuan teknologi dan informasi (TI) seperti saat ini, tuntutan masyarakat sebagai konsumen akan jaminan mutu dan kualitas (*quality assurance*) pendidikan semakin gencar fenomena inilah yang menyebabkan sekolah dan institusi pendidikan lainnya terus berbenah jika tidak ingin ditinggalkan konsumennya. Proses pembenahan dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas ini, tentu saja membutuhkan peran fungsi pengawasan agar bisa di ukur atau dievaluasi; seberapa jauh tingkat keberhasilan yang sudah dilakukan dan yang mana yang perlu di benahi. Masalah utama yang di hadapi bangsa indonesia dewasa ini adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, dalam peradaban umat manusia yang selalu mengalami perubahan.

Maka keberhasilan dalam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menghadapi persaingan dunia global.

Sayangnya perubahan-perubahan yang dilakukan seringkali terjebak pada perubahan yang kosmetis artinya perubahan tersebut semata dilakukan secara artifisial bukan substansial. Perubahan sekedar dilakukan pada level administratif bukan pada level substantif. Salah satu peran penting pengawas adalah mengubah kebiasaan melakukan perubahan yang kosmetis dan artifisial menjadi perubahan yang substantif dan bermakna bagi dunia pendidikan secara keseluruhan, bukan sekedar perubahan formalistis. Tarikan-tarikan pragmatisme yang membawa pada formalisme perubahan oleh pengawas diarahkan untuk menjadi perubahan substantif. Sehingga proses perubahan pendidikan di tanah air menjadi bermutu.

Pada karakter kunci pengawas maka diperlukan pengawas yang setidaknya memiliki integritas, bersikap optimistis, menumbuhkembangkan perubahan, berani mengambil resiko untuk sesuatu yang diyakini sebagai benar, gigih/tangguh, katalis, berdedikasi atau berkomitmen kuat. Kegigihan pengawas itu selalu berupaya untuk meyakinkan orang lain bahwa jalan yang ditempuhnya adalah benar. Pengawas bukanlah orang yang “ bila dijalankan terus gagal, dia akan menyerah dan cari jalan lain.

Pengawasan dalam pendidikan merupakan pengawasan yang khas yang hanya berlaku dalam pendidikan, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik melalui kegiatan belajar mengajar bermutu yang dilayani guru. Dikatakan khas karena sifat kepengawasannya berkaitan dengan pengakuan dan penghargaan atas diri anak sebagai manusia yang utuh yang harus dihargai dan dihormati, bukan pengawasan seperti pada proses produksi barang.

Dalam pendidikan, pengawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Usaha meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah dapat dilakukan dengan memberikan bantuan profesional dalam bentuk penyelenggaraan, konsultasi dan bimbingan, dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kompetensi lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru pada pasal: 1 ayat 1 guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pada pasal: 2 ayat 1 guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada ayat 3 Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, atau kecakapan, yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Keputusan Walikota Ternate tentang Rincian Tugas Pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate meliputi: Susunan organisasi, kepala dinas, bagian tata usaha,

bagian umum, bagian kepegawaian, bagian perencanaan dan evaluasi, sub dinas pendidikan dasar dan taman kanak-kanak, sub dinas menengah, umum, dan kejuruan, cabang-cabang dinas dan unit pelaksanaan teknis diknas. Untuk kelancaran tugas tersebut, maka mengacu pada keputusan Walikota Ternate Nomor 32 Tahun 2004 tentang Rincian Tugas Pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate dengan menimbang bahwa: Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dinas untuk sumber daya guna dan berhasil guna maka Pemerintah Kota Ternate perlu menindaklanjuti peraturan tersebut dengan melaksanakan pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja Diknas Pendidikan Nasional Kota Ternate mengingat; Peraturan Pemerintah Nomor 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom; Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Nasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor; 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor; 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor; 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Terwujudnya hasil pembangunan dalam rangka menuju Kota Ternate sebagai Kota Pendidikan Yang Berkualitas, Pariwisata yang Berbudaya, Pertumbuhan dan Pelayanan Jasa yang Prima, Terciptanya masyarakat Madani dan Ramah Lingkungan yang oleh prinsip-prinsip partisipasi, Penegakan hukum, Transparansi, Responsibilitas, Konsensus/komitmen, Keadilan, Kredibilitas, Efektif dan Efisien, Akuntabilitas dan mempunyai wawasan kedepan.

Sumber daya manusia yang berkemampuan memadai, perlu disusun suatu strategi yang tepat dalam berbagai aspek agar setiap sumber daya manusia yang ada dilindungi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate akan mampu mengemban kualitas sumber daya manusia merupakan isu yang perlu ditangani secara cepat oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate agar unit kerja tersebut menjadi motor penggerak penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan dibidang pendidikan pada Kota Ternate. Kota Ternate adalah ibu kota pertama provinsi Maluku Utara yang sebelumnya adalah ibukota kabupaten Maluku Utara dalam wilayah provinsi Maluku. Berdiri Provinsi Maluku Utara yaitu berdasarkan UU Nomor 46 tahun 1999 (tanggal 4 oktober 1999) yang terdiri dari 2 kota 7, kabupaten 45 kecamatan, 80 kelurahan serta 650 desa.

Dengan lahirnya provinsi tersebut maka Kota Ternate memiliki 7 kecamatan dan 7 cabang dinas pendidikan nasional dimasing-masing kecamatan serta 72 kelurahan. Perincian jumlah penduduk dimasing-masing kecamatan yaitu; kecamatan Kota Ternate Utara 60.632, kecamatan kota Ternate Tengah 38, 498, kecamatan kota Ternate Selatan 30.000, kecamatan Pulau Ternate 10.000, kecamatan Hiri 4.105, kecamatan Moti 4.563, kecamatan Batang Dua 3.380, total jumlah penduduk Kota Ternate 151.117 orang, jumlah penduduk tersebut merupakan salah satu tanggung jawab yang besar dari pemerintah Kota Ternate terutama Dinas Pendidikan Nasional untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan didaerahnya.

Pada tahun 2011 jumlah sekolah dasar negeri dikota Ternate 83 buah bangunan yang terdiri dari 933 tenaga guru sekolah dasar dan 18814 orang siswa, sekolah lanjutan tingkat pertama 13 gedung yang terdiri dari 476 jumlah tenaga pengajar dan 6540 orang siswa, sekolah menengah umum negeri 13 gedung sekolah terdiri dari 633 tenaga guru dan 5936 orang siswa, sementara gedung sekolah pada sekolah menengah kejuruan yaitu 4 buah gedung sekolah yang terdiri dari 211 orang tenaga pengajar dan 2777 orang siswa.

Demikian sumber daya guru/ tingkat pendidikan. Guru yaitu terdiri dari guru sekolah dasar negeri setara SLTA (SPG, SGO, KPG, PGA) 59,5 persen, D2 34,9 persen serta strata satu (SI) 5,6 persen. Pada guru sekolah lanjutan tingkat pertama negeri setara D2 37,0 persen, strata satu (SI) 62,2 persen serta strata dua (S2) 0,8 persen. Guru pada sekolah menengah umum negeri strata satu (Si) 97,3 persen dan strata dua (S2) 2,7 persen, serta tenaga pengajar disekolah menengah kejuruan negeri ijasah terakhir yang dimiliki strata satu (SI) yaitu 98,6 persen dan strata dua (S2) 1,4 persen. Dinas pendidikan kotan Ternate, adalah lembaga yang mewadahi peran masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pendidikan dikota Ternate. Jika pengawas sekolah benar-benar memahami dan menerapkan kompetensi pengawas sekolah yang tercantum dipermendiknas No. 12 Tahun 2007, maka dapat dipastikan kecil kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yakni ada nada miring mengenai pengawas sekolah dilapangan. Keberadaan pengawas sekolah sebagai unjuk tombak pengawal kebijakan Dinas Pendidikan melalui sebuah Renstra (Rencana dan Strategi) sudah didesain dalam kurung waktu lima tahun untuk memberikan pemahaman terhadap peningkatan mutu disekolah.

Melalui tangan dingin, seorang pengawas sekolah mengarahkan mau dibawah kemana mutu pembelajaran sekolah binaan masing-masing. Sebab, mutu pendidikan sebuah kota/kabupaten sangat tergantung dari upaya seorang pengawas sekolah dalam mensinergikan segitiga emas antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah sebagai pertanggungjawaban penjamin mutu kepada publik. Pengawas sekolah berjiwa usaha mencerminkan kepribadian yang memberi kekuatan bagi sekolah memiliki budaya berprestasi secara berkelanjutan. Pengawas sekolah harus mampu menumbuhkan sekolah yang dapat menghasilkan karya nyata, bukan sebatas teori, tetapi mampu meningkatkan daya saing bangsa. Pengawas sekolah yang mempunyai keyakinan kuat jika sinergitas dapat dibangun dengan komitmen, konsisten, dan konsekuen yang tinggi, maka cita-cita mewujudkan mutu pendidikan akan tercapai dengan baik sesuai dengan visi, misi, di sekolah-sekolah masing-masing sebagai penjabaran Renstra Dinas pendidikan. Sehubungan masalah diatas, maka menarik dan relevan untuk di teliti mengenai manajemen supervisi oleh pengawas di lingkungan dinas pendidikan nasional kota ternate, dalam penyelengaran peningkatan mutu pendidikan disekolah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana manajemen supervisi Pembelajaran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru IPS di SMP Negeri 2 Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik untuk dapat menggambarkan secara alami, lengkap, mendalam dan utuh mengenai pokok persoalan.

Jenis penelitian ini kualitatif naturalistik. Naturalistik bermakna metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyektif alamiah. Sedangkan menurut (Moleong, 1998) dalam Suharsimi Arikunto (2010:24) penelitian kualitatif adalah studi kasus, maka segala sesuatu sangat tergantung pada kedudukan peneliti. Dengan demikian peneliti berkedudukan sebagai instrumen penelitian yang utama.

Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate merupakan tempat penelitian. Pertimbangan memilih SMP Negeri 2 Kota Ternate ini disampaing alasan waktu dan sumber daya yang tersedia. Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tersebut dijadikan lokasi penelitian atas dasar pertimbangan antara lain dari segi kualitas, lokasi, dan prestasi para Guru IPS SMP Negeri 2 Kota Ternate. Dari 6 orang Guru IPS yang berprestasi, maka yang dipilih sebagai subjek penelitian. Pengawas tersebut mendapat penghargaan dari Menteri Pendidikan Nasional sebagai pengawas berprestasi. Penelitian ini di mulai pada bulan Agustus 2016 sampai dengan Desember 2016.

## PEMBAHASAN

### A. Manajemen Supervisi

Dengan berlandaskan pada judul penelitian, teori-teori yang akan diungkapkan sebagai pemikir meliputi; 1) konsep manajemen secara umum; 2) manajemen pendidikan; 3) efektifitas kinerja pengawas dalam manajemen supervisi dilingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate; 4) pengaruh manajemen supervisi pengawas terhadap peningkatan mutu pendidikan guru di Kota Ternate.

#### 1. Konsep Manajemen Secara Umum

Kata Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. *Managere* di terjemakan dalam Bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata kerja *management*, dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya *management* diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Dengan demikian jika kata kerja digabung menjadi kata *managere* yang artinya menagani (Husain USMA, 2010: 5).

Manajemen adalah proses dari perencanaan, pengorganisasian, pemberi pimpinan, dan pengendalian dari suatu usaha dari anggota organisasi yang penggunaan sumber-sumber daya organisatoris untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan James A. F. Stoner dalam Syaiful Sagala (2010: 51).

Pimpinan harus bisa menunjukkan kemampuannya untuk mempengaruhi perilaku orang lain kearah tercapai suatu tujuan yang diinginkan, guna peningkatan organisasinya. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Belanda-Indonesia sebagai mana dikutip dari Suahrsimi Arikunto dan Lia Yuliana (2012: 2) bahwa istilah manajemen berasal dari "*administratie*" yang berarti tata usaha. Dalam pengertian tersebut, administrasi menunjukkan pada pekerjaan tulis menulis di kantor. Pengertian lain dalam bahasa Inggris "*administration*" sebagai "*the management of executive affairs*". Dengan batasan pengertian ini maka disinonimkan dengan "management" suatu pengertian yang lebih luas.

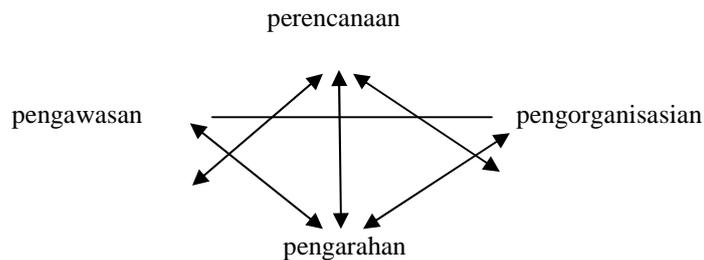
Lebih lanjut di nyatakan oleh Suahrsimi Arikunto dan Lia Yuliana (2012: 3) bahwa manajemen adalah rangkaian segala kegiatan yang menunjuk kepada usaha kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pengertian manajemen selalu menyangkut adanya tiga hal yang merupakan unsur yang sangat penting, yaitu a). usaha kerjasama, b), oleh dua orang atau lebih, dan Hal ini juga disebutkan oleh Mary Parker Follet dalam Hikmat (2009: 12) bahwa manajemen adalah suatu seni karena melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan keterampilan khusus, terutama keterampilan mengarahkan, memengaruhi, dan membina para pekerja agar melaksanakan keinginan pemimpin demi tercapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan penjelasan di atas maka untuk mencapai tujuan organisasi maka perlu mengatur orang lain agar terlibat secara utuh demi kemajuan, bertanggung jawab dan merasa memilikinya.

Manajemen tidak hanya terbatas pada mengatur orang lain melainkan lebih kompleks lagi yakni pendayagunaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) untuk dapat mencapai tujuan organisasinya. Seperti yang dijelaskan oleh The Liang Gie dalam Mulyono (2009: 17) bahwa manajemen adalah sebagai perencanaan, pengkoordinasian dan pengontrol terhadap sumber daya manusia dan alam untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam mendayagunakan bahan baku dan sumber daya manusia kedalam bentuk kegiatan kerja mengikuti alur perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan. Seperti yang diungkapkan oleh Joseph L. Massie dalam Syaiful Sagala (2010: 52) manajemen adalah salah satu faktor produksi bersama dengan tanah (sumber daya alam), tenaga kerja, dan modal untuk mencapai sasaran organisasi.

Dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM), maka pengelolaan sumber daya alam dapat terlaksana walaupun ada faktor penunjang di antaranya modal, tenaga kerja, maka untuk mencapai sasaran organisasi perlu untuk di adakan pengawasan dan evaluasi (George R. Terry dalam Mulyono, 2009: 16) bahwa manajemen adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan, yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lain. Dengan mencermati pengertian diatas maka apapun yang mau kita buat harus ada perencanaan yang matang sehingga dapat menghasilkan, menentukan sesuatu yang menjadi tujuan dalam peningkatan sumber daya manusia yang handal.

## 2. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen adalah merencanakan sebuah program kerja secara konseptual meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan. Sebagaimana tergambar pada diagram berikut.



## B. Efektifitas Supervisi oleh Pengawas

Pengawas sekolah ialah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan disekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan segi teknis pendidikan, administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah. Instansi pembina jabatan fungsional pengawas adalah Depdiknas.

### 1. Ruang lingkup Kegiatan Pengawas

Ruang lingkup kegiatan pengawas sekolah, jenis pengawas sekolah, jenjang, jabatan, pangkat, golongan, angka kredit yang disyaratkan, tugas pokok dan pembagian kerja pengawas sekolah, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai, kelengkapan dan data cara pengajuan usul penetapan angka kredit, tata cara penilaian, prestasi kerja yang dinilai, penetapan angka kredit, pengangkatan pertama kali atau pengangkatan kembali dalam jabatan pengawas sekolah, kenaikan jabatan/pangkat pengawas sekolah, pembebasan sementara dan pemberhentian, pembinaan dan pengawasan, semuanya sudah diatur dalam Keputusan Mendikbud RI No. 020/U/1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya.

Jika dilihat secara mikro, pada dasarnya struktur organisasi pengawas sekolah yang sudah berjalan selama ini bukan merupakan sumber munculnya permasalahan dalam kepengawasan pendidikan. Namun, apabila dilihat secara makro, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditinjau kembali. Hal tersebut akan nampak anatar lain jika dikaitkan dengan bidang-bidang kepengawasan yang juga dilakukan lembaga lain, misalnya LPI, LPMP, Insektorat Jenderal Depdiknas, BPKP, dan sebagainya. Inilah yang kemudian memunculkan upaya pencerahan melalui “kue” pengawasan pendidikan disekolah-sekolah. Kondisi ini masih dirasakan oleh para guru dan kepala sekolah adalah bahwa jabatan pengawas sekolah adalah “senioritas”, memiliki kekuasaan lebih. Sebaliknya masih ada sebagian yang beranggapan bahwa pengawas lebih rendah dari kepala Cabang Dinas Pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, mereka menginginkan keberadaan pengawas

hedaknya ditempatkan sesuai dengan struktur yang benar, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## 2. Tugas Utama Pengawas

Tugas utama pengawas sekolah tersebut adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu, baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya (Keputusan Bersama Mendiknas dan kepala BAKN, 1996).dalam Sri Banun Muslim, (2010:69).Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 54 ayat (8) menyatakan bahwa pengawas terdiri dari pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran.

- a. Tugas pokok pengawas satuan pendidikan  
Tugas pokok pengawas satuan pendidikan adalah melakukan pengawasan manjerial terdiri atas pembinaan, pemantuan (standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan kependidikan) dan penilaian kinerja sekolah pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya.
- b. Tugas pokok pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran  
Tugas pokok pengawas matapelajaran atau kelompok matapelajaran adalah melaksanakan pengawasan akademik meliputi pembinaan, pemantuan, pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi kelulusan) dan penilaian kerja sekolah pada satuan pendidikan yang ditetapkan.
- c. Tugas pokok pengawas bimbingan dan konseling  
Tugas pokok pengawas bimbingan dan konseling meliputi pembinaan, pemantuan pelaksanaan bimbingan dan konseling pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.
- d. Tugas pokok pengawas SLB  
Tugas pokok pengawas adalah melaksanakan pengawasan akademik meliputi pembinaan, pemantuan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan pada sejumlah SLB di kabupaten/kota.

## 3. Uraian tugas pengawas

Kegiatan bagi pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok matapelajaran untuk ekuivalensi dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu diuraikan sebagai berikut:

- a. Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas satuan pendidikan terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan jumlah sekolah yang dibina.
- b. Jumlah sekolah yang harus dibina untuk tiap pengawas sekolah adalah sebagai berikut:
  1. Pengawas Taman Kanak-Kanak melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 10 sekolah dan paling banyak 15 sekolah.

2. Pengawas Sekolah Dasar melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 10 sekolah dan paling banyak 15 sekolah.
3. Pengawas Sekolah Menengah Pertama melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 7 sekolah dan paling banyak 15 sekolah.
4. Pengawas Sekolah Menengah Atas melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah.
5. Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah.
6. Pengawas Sekolah Luar Biasa melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah.

Pengawas melakukan pengawasan paling sedikit 5 (lima) sekolah/madrasah binaan untuk daerah khusus. Lingkup kerja pengawas matapelajaran atau pengawas kelompok matapelajaran untuk melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Pengawas Guru Taman Kanak-Kanak (pendidikan usia dini formal) melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 60 guru sekolah dan paling banyak 75 guru kelas di TK.
- b. Pengawas Guru Sekolah Dasar paling sedikit 60 guru dan paling banyak 75 guru kelas di SD.
- c. Pengawas Mata pelajaran pada Sekolah Menengah Pertama melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru di SMP.
- d. Pengawas Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah Atas melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru di SMA.
- e. Pengawas Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru di SMK.
- f. Pengawas Sekolah Luar Biasa melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru matapelajaran luar biasa.

Pengawas terdiri atas 2 jenis (Aqib, dalam Jerry H. Makawimbang, 2011: 121) yaitu:

1. Pengawasan Melekat, adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atau langsung kepada staf di unitnya (sekolah= kepala sekolah).
2. Pengawas Fungsional, adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang secara fungsional tugasnya sebagai pengawas.

### **C. Manajemen Supervisi Pengawas terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Guru**

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam pasal (1) bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan menevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah.

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan/pekerjaan sebagai guru.

## 1. Tugas Guru

Guru memiliki banyak tugas, baik yang terkait oleh dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengaduan. Apabila di kelompok kanter dapat tiga jenis tugas guru, yakni tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan.

- a. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.
- b. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Pelajaran apa pun yang diberikan, hendaknya dapat menjadi motivasi bagi siswanya dalam belajar. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat dilingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila.
- c. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan

Peran guru tidaklah terbatas di dalam masyarakat, bahkan pada hakikatnya merupakan komponen yang strategis yang memilih peran yang penting dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa. Bahkan keberadaan guru merupakan faktor *conditio sine qua non* yang tidak mungkin digantikan oleh komponen mana pun dalam kehidupan bangsa sejak dulu, terlebih-lebih pada era kontemporer ini. Keberadaan guru sebagai suatu bangsa amatlah penting, apalagi bagi suatu bangsa yang sedang membangun, terlebih-lebih bagi keberlangsungan hidup bangsa di tengah-tengah lintasan perjalanan zaman dengan teknologi yang kian canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kepada kehidupan yang menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamika untuk dapat mengadaptasikan. Semakin akurat para guru melaksanakan fungsinya, semakin terjamin tercipta dan terbina kesiapan dan keandalan seseorang sebagai manusia pembangunan. Dengan kata lain, potret dan wajah diri bangsa dimasa depan tercermin dari potret diri para guru masa kini, dan gerak maju dinamika kehidupan bangsa berbanding lurus dengan citra para guru di tengah-tengah masyarakat.

## 2. Peran Guru dalam proses belajar mengajar

Perkembangan baru terhadap pandangan belajar-mengajar membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kmpetensinya karena proses belajar-mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang optimal. Peranan dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal sebagai mana yang di kemukakan oleh Adams dan Decey dalam *Moh. Uzer USMAN*,

(2010:9) antara lain guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspeditor, perencana, supervisor, motivator, dan konselor.

### 3. Kompetensi profesionalisme guru

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS. Purwadarminta dalam Moh. Uzer USMA, (2010:14) kompetensi adalah (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi (competency) yakni kemampuan atau kecakapan. Kompetensi guru merupakan kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Dari gambaran diatas pengertian tersebut maka kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.

Kata profesional berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian. Pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain Nana Sudjana dalam Moh. Uzer USMA, (2010:14).

Bertitik tolak pada pengertian diatas maka guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga guru mampu melakukan tugas dan fungsinya kemampuan yang maksimal. Profesionalisme pekerjaan guru dapat dilakukan dalam masa prajabatan. Artinya kegiatan profesional meliputi peningkatan kemampuan profesional guru yang telah berada dan sedang bekerja dalam sistem pendidikan supaya mereka lebih mampu melaksanakan tugas dan dapat memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kiat pendidikan yang luwes dan tuntutan kualifikasi guru. Menurut Briggs dan Justman, dalam Fathurroman dan Suryana, (2011: 19) mengatakan bahwa: "supervisi adalah usaha yang sistematis dan terus-menerus dalam rangka memberikan dorongan dan pengarahan bagi perkembangan profesional guru. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan memberikan kesempatan kepada para guru untuk meningkatkan kualitas kerja melalui berbagai macam pelatihan-pelatihan, sehingga mampu mengemban tugas sebagai seorang tenaga profesional.

#### **D. Kendala-kendala apa yang dijumpai dalam Pembelajaran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru IPS Di SMP Negeri 2 Kota Ternate.**

1. Kurangnya perhatian pemda dalam peningkatan profesionalisme pengawas.
2. Kurangnya sarana transportasi yang memadai bagi pengawas.
3. Belum ada ruang khusus bagi pengawas.
4. Kurangnya buku panduan tentang supervise pengawas.
5. Kurangnya pemahaman konsep tentang supervise oleh pengawas.
6. Guru yang disupervisi tidak menyiapkan perangkat pembelajaran pada saat di supervisi.
7. Banyak guru pada jam pertama yang terlambat pada saat pengawas memulai pelaksanaan supervisi.
8. Pengunaan waktu yang tidak efektif oleh guru pada saat di supervisi oleh pengawas.

9. Pengelolaan kelas yang tidak efektif oleh guru pada saat diadakan supervise oleh pengawas.

### SIMPULAN

Penelitian ini secara garis besar berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang dapat diberikan berkenaan dengan penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan analisis data tersebut dapat ditarik bahwa terhadap pembelajaran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru IPS di SMP Negeri 2 Kota Ternate dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalnya boleh dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya. Pengawas sekolah berjalan apa adanya dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan dengan bekal kemampuan yang telah dimilikinya. Pengawas juga membuat laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan tentang apa yang telah dilakukannya sesuai dengan tupoksinya namun laporan tersebut belum dijadikan dasar bagi upaya pembinaan para pengawas. Walaupun ada pembinaan terbatas pada arahan dan penjelasan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 tentang berbagai kebijakan pendidikan dalam rapat-rapat khusus dengan para pengawas dan pejabat lainnya. Pembinaan para pengawas yang dilaksanakan secara terencana dan bersinambungan yang mengarah pada kemampuan profesional para pengawas dan pengembangan karirnya sebagai tenaga fungsional belum banyak dilaksanakan. Lemahnya pembinaan para pengawas diduga berkaitan dengan sumberdaya yang terbatas pada setiap dinas pendidikan, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan maupun sumber daya informasi. Selain itu komitmen dinas pendidikan terhadap pentingnya peran pengawas dalam meningkatkan mutu pendidikan terkesan kurang optimal, sehingga program pembinaan bagi para pengawas belum menjadi prioritas. Pada sisi lain, hasil kerja yang dicapai para pengawas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya belum begitu signifikan terhadap kemajuan-kemajuan sekolah binaannya. Oleh karena itu, posisi, peran dan eksistensi pengawas kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan guru dan kepala sekolah. Di samping itu, penempatan tugas pengawas satuan pendidikan menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah SMP Negeri 2 dengan mempertimbangkan tipe dan kondisi geografis letak sekolah selaras dengan bidang dan jenjang jabatan pengawas. Selanjutnya pembinaan dan pengembangan pengawas satuan pendidikan dilaksanakan secara berkelanjutan agar kemampuan profesional serta karirnya sebagai pengawas satuan pendidikan meningkat sejalan dengan prestasi yang dicapainya. Dengan kata lain pembinaan dan pengembangan pengawas diarahkan untuk memelihara, mempertahankan serta mempertinggi kinerjanya sehingga berdampak pada peningkatan mutu sekolah binaannya. Pembinaan pengawas dimaksudkan sebagai upaya yang terencana dalam memelihara dan meningkatkan kemampuan profesi dan karirnya sehingga mempertinggi kinerjanya sebagai pengawas satuan pendidikan yang profesional.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Imron. 2011. *Supervisi pembelajaran tingkat satuan pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- A.R. Tilaar. 2008. *Manajemen pendidikan nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dadang Suhardan. 2010. *Supervisi profesional*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyasa E. 2011. *Manajemen berbasis sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hikmat. 2009. *Manajemen pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Husaini, USMAN. 2010. *Manajemen teori, praktek, dan riset pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jerry H. Makawimbang. 2011. *Supervisi dan Peningkatan mutu pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Lexy J. Moleong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maryono. 2011. *Dasar-dasar menjadi supervisor pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Moh. Uzer USMAN. 2010. *Menjadi guru profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Margono. 2011. *Metodologi penelitian pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ngalim Purwanto. 2010. *Administrasi dan supervisi pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 2010. *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Sudarwan Danim. 2008. *Visi baru manajemen sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saifuddin Azwar. 2011. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana. 2012. *Manajemen pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Umiarso dan Imam Gojali. 2010. *Manajemen Mutu Sekolah*. Yogyakarta: IRCiSoD.